**EKSISTENSI HUKUM ADAT MELAYU LIMO KOTO DALAM PENERAPAN
SANKSI TERHADAP PELAKU PENCURIAN KAYU RIMBA LARANGAN ADAT
DI NAGARI RUMBIO**

Oleh : Khairul Bakri

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,Hum

Pembimbing 2 : Dr. Zulfikar Jayakusuma,SH.,M.H

Email : khairulbakri7@gmail.com – telepon : 082398801182

ABSTRACT

The law always exists in every society. In the Limo Koto Kenegarian Region, Rumbio Jaya District, the community still uses their customary law in resolving criminal acts or crimes, especially crimes in the theft of jungle timber / customary forest prohibitions. The purpose of this thesis writer is: First, how is the application of sanctions against the perpetrators of illegal logging of forest timber in Nagari Limo Koto, Rumbio Jaya District. Second, what is the position and constraints of customary law on law enforcement and how is the practice in Nagari Limo Koto, Rumbio Jaya District.

This type of research uses direct sociological research methods at the location or place to be studied. This research was conducted in Kanagarian Limo Koto, Rumbio Jaya District, Kampar Regency, Riau Province. While the population and sample are all parties related to the problems examined in this research, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data, the technique of data collection in this study is by interview and document study.

Conclusion that the existence of the imposition of sanctions against perpetrators of illegal logging / forest prohibition of customary laws such as social sanctions and criminal fines in terms of practice in the field has begun to fade and the lack of supervision of the forest / jungle ban until now, people are still taking wood silently and stout motive or method used by the perpetrator. The writer's suggestion is for the nagari government and its instruments to increase the supervision of the forest / jungle of customary prohibitions and to make nagari regulations governing customary law or violation of customary law and to work with government authorities and the police and to socialize to the nagari Limo Koto community so that customary law is Malay Koto limo still exists and will not fade with the times

Keywords: Existence - Customary Law - Theft of Nagari Forest / Forest

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum ada yang tertulis maupun tidak tertulis.¹ sistem hukum Indonesia terdiri dari hukum public dan hukum privat hukum publik, hukum public termuat adanya suatu Asas Legalitas tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan,² dan hukum privat yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat.³

Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu hukum adat. J.Crim.L.Mengatakan penerapan berbagai sistem hukum salah satunya hukum adat yang dimaksudkan semata-mata untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan masyarakat, kelompok etnis, adat istiadat dan warisan yang dikonfirmasi dalam aturan dan berlaku oleh penegak hukum.⁴ Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan dihormati, pengadilan

¹ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT.Paramita, Jakarta: 1967, hlm 5

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm 25

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)* PT. Refika Aditama, Bandung: 2018, hlm 14.

⁴ J. Crim. L., 2004, "*eligibility rightt liberty discrimination*", vathek publishing, Chapter LXVIII, saries 2` winter, hlm 473-475. diakses melalui www.fh.ur.ac.id, diterjemahkan dengan google tanggal 17 September 2019.

yang memutuskan perkara sesuai hukum adat bukan berarti membuat norma hukum baru, melainkan semata-mata menerapkan undang-undang yang sudah ada.⁵ Salah Satu hukum adat yang masih hidup di Indonesia adalah hukum adat Melayu Limo Koto, Adat Limo Koto Ini tergabung dalam Pemerintahan *Andiko Nan 44* yaitu; 5 Koto Tengah (Kuok, Salo, Bangkinang, Airtiris, dan Rumbio). Limo berarti lima, Koto artinya Kenegerian. *Limo* Koto berarti, lima Negeri yang terdapat di Kenagarian Rumbio.

Tiap-tiap desa memiliki, Dusun, RT, dan RW dan khususnya Nagari Rumbio memiliki *Lima* suku besar yaitu; (1). Suku Domo, (2). Suku Petopang, (3). Suku Piliang, (4). Suku Kampai, (5). Suku Caniago. Hukum adat Melayu Limo Koto bersumber pada "*Adat Tali Nan Bapilin Tigo Tungku Sajogbagan atau Tri Tunggal*" yaitu, Adat, Agama, dan Undang-Undang/pemerintah⁶, adat istiadat yang mana Kenagarian Rumbio teknis pengambilan keputusan dengan "*Undang Jati*" yaitu "*Jawuoh Mamanggie Karib, Dokek Mamanggie Kaum*" artinya segala perkara atau perhitungan diselesaikan dengan musyawarah, perhitungan tidak bisa habis ditempat perkara saja, yang mempunyai perkara wajib memanggil sanak pemili untuk memperhitungkan, "*Kusuik Yang Mau Diselesaikan*

⁵ Neil Duxburry, 2017, "*Costum As Law In English Law*" Combridge Of Law, Chapter Lxxvi, Series 2, Summer 337 -359. diakses 19 September 2019

⁶ LSM Nakhoda,. *Op.cit.* hlm. 9

Kowuoh Mau di Jernihkan".⁷ penyebutan hukum adalah *Cupak*, sistem peradilan dan cara-cara yang dipakai untuk mengadili perkara-perkara putusan peradilan kerapatan Lembaga Adat Kampar (LKAK) sebagai lembaga formal yang dilaksanakan oleh para penghulu/niniok mamak berdasarkan hukum Adat Limo Koto Nagari Rumbio Penerapan sanksi pidana adat berbentuk pemberian sanksi sosial berupa kecaman atau pengucilan ditengah masyarakat, sanksi pidana apabila menyangkut kriminal dikenakan denda atau diusir dari kampung.⁸

Salah satu tindak pidana yang di selesaikan dengan adat adalah pencurian kayu hutan Larangan Adat *Ghimbo Potai* dan *Ghimbo Pomuan*, kata *ghimbo* adalah Hutan yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.⁹ Wilayah Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio terletak di *Empat Kampung/Desa* yakni; Desa Rumbio, Desa Pulau Sarak, Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berbatasan dengan perkebunan masyarakat.¹⁰ kawasan hutan Adat

larangan *Ghimbo Potai* dan *Ghimbo Pomuan* seluas 1.500 hektare. Akibat Penggunaan lahan perkebunan oleh masyarakat sekitar, luasnya menyusut tersisa 720 hektare. Hutan adat larangan *ghimbo potai* dan *ghimbo pomuan* dikuasai oleh suku asli yaitu suku *domo* dan suku *patopang*, keputusan yang dikeluarkan oleh *niniok mamak* atau *pucuok* adalah memakai asas "*Nan Lusuo Dek Mamakai, Nan Pasal Dek Manuik*" artinya segala sesuatu yang dilaksanakan/diputuskan harus menurut kebiasaan/ketentuan yang selalu (*lusuo*) dipakai menurut ketentuan adat yang turun temurun.¹¹ yang menagatur sanksi adalah *Undang Si Jalo Ghapek, Undang Nan Sedalapan* dan *Undang Nan Duo Boleh*.¹² Hukum adat Melayu Limo Koto dalam adat Kenagarian Rumbio adalah hukum Agama, Adat, dan Undang, yaitu; mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan secara segaja. Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain. Adat bersumber dari kebiasaan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Agama berdasarkan Syara' bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Hadis. Undang/Pemerintah bersumber dari mufakat atau musyawara.¹³ penerapannya sanksinya berdasarkan keputusan melalui pengadilan adat yang diselesaikan oleh penghulu adat atau *niniok mamak* dari sukunya yang telah disetujui oleh

⁷ LSM Nakhoda,. *Op.cit.* hlm. 10

⁸LSM Nakhoda,. *Op.cit.* hlm. 5

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹⁰ AL-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 15 , No. 2 , Juli – Desember 2016

¹¹ *Ibid.*, hlm. 183

¹² *Ibid.*, hlm. 124

¹³ LSM Nakhoda,. *Op.cit.* hlm. 8

masyarakatnya seperti denda adat tau sanksi sosial.¹⁴ Sementara dalam praktiknya saat ini hukum pidana adat pada Nagari tersebut mulai tidak digunakan lagi oleh masyarakat adat setempat sudah jarang digunakan oleh masyarakat setempat, akibatnya keberadaan hukum pidana adat melayu limo koto Nagari Rumbio terutama pemberian sanksi adat mulai hilang atau berkurang dalam penerapannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Eksistensi Adat Melayu Limo Koto dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku pencurian Kayu Hutan/Rimba Larangan Adat di Nagari Rumbio**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kayu hutan larangan adat berdasarkan hukum adat Melayu Limo Koto Nagari Rumbio?
2. Bagaimana kedudukan hukum serta kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kayu hutan larangan adat di Nagari Rumbio kabupaten kampar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kayu berdasarkan hukum adat Nagari Rumbio.
- b. Untuk mengetahui kedudukan dan kendala yang dihadapi oleh adat limo koto dalam penerapan

sanksi bagi pelaku pencurian kayu hutan larangan adat setempat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam bidang hukum pidana adat. Khususnya bagaimana eksistensi penerapan sanksi itu sendiri seiring dengan perkembangan zaman oleh niniok mamak dan pemerintahan Nagari Rumbio
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi kepentingan kelanjutan ilmu pengetahuan yang terarah, dan terdepan bagi fakultas hukum khususnya dan Universitas Riau umumnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai penerapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana kata pidana yang umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman. Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹⁵ Pidana adalah hukuman yang

¹⁴ LSM Nakhoda, *Op.cit.* hlm 6

¹⁵ P.A.F.Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm, 2

dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁶ Hukum pidana Indonesia mengenal dua jenis pidana Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (straafrechttheorieën), yang ada pada umumnya dibagi tiga golongan yaitu:

- a. Pembalasan atau Teori Absolut¹⁷
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan¹⁷
- c. Teori gabungan

2. Teori “Living Law”

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku, Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya Living law, biasa disebut dengan istilah “hukum adat”. Hukum adat merupakan hukum yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial. Hukum adat (

the living law) dimakanai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan *ius constitutum* dan bukan pula *ius constituendum*. *ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) sedangkan *ius constituendum* berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan dimasa mendatang.¹⁸ Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif).¹⁹ Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich²⁰ menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum, dapat diketahui bahwa *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya

¹⁸ Makalah disajikan dalam Seminar Nasional: *Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Riau pada hari Selasa tanggal 7 November 2017

¹⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.

²⁰ *Ibid*, hal. 493.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *OP, cit*, hlm. 129.

¹⁷ *Ibid*, hlm, 142

masyarakat, Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan Eugen Ehrlich menyatakan: “*Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)*”.²¹

Pendapat Friedrich Karl von Savigny. F.K. von Savigny mengemukakan teorinya *Volksgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter*, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.²²

E. Kerangka Konseptual

- 1) Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual, atau segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.²³

²¹ Eugen Ehrlich, *Op.cit*, hlm. 142.

²² Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 37, 1989, hlm. 95-98.

²³ <http://.wikipedia.com>, diakses tanggal 19 September 2019

- 2) Penerapan pengenaan atau perihal mempraktikkan.²⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penerapan adalah penegakan atau perihal mempraktikkan.
- 3) Cupak adalah nama dari hukum.²⁵
- 4) Lembaga Kerapatan adat kenagarian (LKAK) adalah satu-satunya lembaga permusyawaratan nenek mamak atau pemangku adat yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat.²⁶
- 5) Panghulu dan datuok adalah yang memegang *tampuok* tangkai yang akan menjadi pengendali para pengawasan pelindung terhadap anak kemanakan serta tempat keluarnya sebuah aturan yang dibutuhkan masyarakat.²⁷
- 6) Nenek mamak adalah adalah merupakan suatu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan penghulu dalam suatu Kenagarian di Kampar yang terdiri dari datuk-datuk, kepala suku atau penghulu suku yang mana mereka berhimpunan dalam sebuah lembaga yang disebutkan.²⁸
- 7) Undang-Undang Adat Tali Nan Bapilin Tigo adalah adat ,agama dan undang (pemeritah) sumber utamanya alam merupakan nilai-nilai, norma-norma, kaidah-kaidah pokok yang dihimpun menjadi “

²⁴ Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Putaka, Jakarta: 1989, hlm. 951

²⁵ *Ibid.*, hlm 112

²⁶ Lsm Nakhoda, *Op.cit*, hlm.202

²⁷ Lsm Nakhoda, *Op.cit*, hlm. 148

²⁸ *Ibid.*, hlm 5

hukum” dasar yaitu aturan hidup pribadi dan aturan hidup bersama

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

sosiologis hukum yaitu penelitian yang menitik beratkan perlakuan individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁹ mengkaji aspek hukumnya dengan pelaksanaannya di lapangan dengan cara survey.³⁰

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kenagarian Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia, barang atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama yang diteliti.³¹ Sampel merupakan bagian dari jumlah

- a) Ketua LKAK Rumbio selaku lembaga tertinggi di adat limo koto
- b) Wali Nagari selaku pimpinan dari masing-masing suku
- c) Niniok mamak selaku penghulu yang ada dalam suku di Rumbio.³²

Pemuka masyarakat nagari Rumbio selaku toko-toko orang yang sangat berpengaruh di suku.

4. Sumber data

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penerapan sanksi adat dan putusan LKAK.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan yang berupa buku dan makalah yang berhubungan dengan objek penelitian
- c) Bahan hukum tersier, bahan penelitian yang diambil dari koran, majala, berita-berita yang melalui media elektronik serta dari kamus/esiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

metode pengumpulan data primer berupa:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi kepustakaa dan dokumen, teknik pengumpulan data yang melalui dokumen serta yang berhubungan dengan adat nagari limo koto, literatur, buku pendukung lainnya

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, kemudian diolah secara kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan melakukan penyorotan terhadap masalah serta usaha untuk pemecahannya, yang mana dilakukan dengan upaya-upaya yang lebih didasarkan pada pengukuran yang memisahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik sebuah generalisasi seluas-luas mungkin ruang lingkungnya. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara akan diolah secara kuantitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.88

³⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 167

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 172

³² [http://www. Wikipedia](http://www.Wikipedia), diakses tanggal 18 desember 2019

deskriptif-analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh responden yang terkait baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hukum Adat Melayu Limo Koto Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencurian Dinagari Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya

Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual atau segala sesuatu yang dialami dan menekan bahwa sesuatu itu masih ada.³³ Sesuai dengan ungkapan pepatah adat Limo Koto “*indak lokak dek pane, idak lapuok dek hujan*” yang artinya adat Limo Koto dengan kearifan local dan peraturannya tidak kan hilang atau punah seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Adat Limo Koto memiliki ciri khas tersendiri yaitu” “*Undang Sijalo Ghapek dan Undang Nan Dua Puluh*”. Adapun *Undang Nan Dua Puluh Dua Puluh* ini terbagi atas dua yaitu undang *Nan Sedelapan* menyangkut bentuk-bentuk perbuatan kejahatan dan *Undang Nan Dua Belas* yang mana mengatur menyangkut pembuktian dan ciri-ciri orang membuat kesalahan. Berdasarkan wawancara dengan Dt. Oyau selaku penghulu pucuk

kampung adat Naghoi Limo Koto dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat memiliki perbedaan-perbedaan tergantung bagaimana kesepakatan niniok mamak dalam Naghoi, adalah hutan naghoi yang di jaga oleh dua suku yaitu *Suku Domo* dan *putopang* yang mana tiap suku mengutus tiga orang, Dt. Kotik momok selaku penghulu *dubalai* menurut beliau untuk jumlah kasus tindak pidana pencurian kayu ini banyak motif dan cara yang dilakukan oleh si pelaku sampai saat sekarang ini proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kayu hutan larangan adat ini diselesaikan melalui musyawarah niniok mamak yang kemudian menjatuhkan dan memutuskan memberikan sanksi hukuman berupa pidana denda dan sanksi sosial kepada pelaku pencurian kayu hutan larangan adat tersebut. jenis-jenis sanksi dalam hukum adat di naghoi Limo Koto.

1. Sanksi Denda

berupa membayar sejumlah uang atau benda kepada naghoi/nagari Jumlah hukuman denda tersebut sangat lah bervariasi tergantung dari besar kecilnya kesalahan dan dampaknya yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan Denda yang paling kecil yaitu singgang ayam atau sagantang beras dan yang paling besar yaitu memotong seekor kerbau atau diganti dengan membeli sebuah barang berharga yang sebanding dengan harga seekor kerbau atau dengan uang sesuai dengan keputusan rapat niniok mamak. Sanksi adat lainnya terhadap pelaku pencurian kayu yaitu;

³³ Kamus Besar Indonesia

a) Apabila pelakunya adalah niniok mamak atau penghulu maka niniok mamak tersebut akan diberhentikan atau diciptkan dari jabatannya sebagai niniok mamak kemudian aru diberi hukuman sesuai dengan hasil putusan mufakat Nagari Limo Koto.

b) Apabila pelakunya *dubalang, malin, pegawai/monti* maka sanksinya berupa akan diberhentiakn atau dicoptkan dari jabatannya sebagai niniok mamak kemudian aru diberi hukuman sesuai dngan hasil putusan mufakat *nagari limo koto*.

Dalam perakteknya sanksi adat dijatuhkan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan melanggar adat maka terlebih dahulu para penghulu yang bertindak sebagai hakim adat mempertimbangkan dengan cara semacam perdamaian usaha ini dapat ditempu dengan jalan kebijaksanaan yaitu:

a) Dicari kaji mengaji untuk penyelesaian

b) Dicari dengan indak magaji untuk penyelesaian

c) Dicari dengan sekato

d) Dicari jalan hukum

e) Dicari jalan nan patuik

alur pelaporan jika terjadi pencurian kayu di hutan larangan adat

1) Adanya laporan dari masyarakat terjadi pengambilan kayu di hutan larangan adat

2) Setelah adanya laporan tersebut, petugas hutan adat memanggil panghulu.

3) Setelah penghulu dipanggil, maka penghulu tadi memanggil *dubalang* dan memerintahkan *dubalang* untuk

memberitaukan kepada niniok mamak bahwa anak atau kaponakannya telah mengambil kayu hutan adat Naghoi Rumbio

4) Niniok mamak langsung mendatangi si pelaku untu dimintak keterangan apakah pelaku mengambil kayu hutan Naghoi Rumbio.

5) Setelah itu niniok mamak membawa sipelaku ke kantor kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan tesebut

6) Setibanya di kantor kepala desa maka diadakan rapat musyawarah adat dimana di dalam tersebut ditunjuk seorang niniok mamak untuk menjadi hakim, biasanya yang menjadi hakim itu adalah niniok mamak yang di tua kan di nagari tersebut

7) Apabila niniok mamak pelaku tidak hadir maka musyawarah bisa dilanjutkan dengan konsekuensi apapun hasil persidangan ini harus diterima oleh pelaku dan keluarga serta sukunya

8) Dalam persidangan ini, niniok mamak akan mendegarkan seluruh pertimbangan dari perwakilan yang hadir terhadap kesaksian yang didapatkan dari saksi maupun pelaku sendiri.

9) Kemudian niniok mamak akan mengambil kesepakatan berupa hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku, apakah hukuman sosial atau denda, dalam dalam hal penelitian ini hukuman yang diberikan oleh niniok mamak yang berintindak selaku sebagai hakim yang mana memberikan hukuman sosial dan denda sebagai efek jerah

terhadap palaku pencurian kayu hutan Naghoi Rumbio tersebut Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan/mufakat dan musyawarah, bukan berdasar pada suatu kaidah tertulis.³⁴

faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya penerapan sanksi pidana adat dikanagarian Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya adalah sebagai berikut:

- a) Faktor penegakan hukum timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati terutama kepada pelaku yang bersala dari keluarga yang tidak mampu sehingga hakim adat atau pun pemuka adat tidak memberikan sanksi yang terlalu berat kepada pelaku.
- b) Faktor masyarakat karena Kenagarian Limo Koto terletak dijalan utama lintas provinsi menuju Sumatra Barat dan dekat dengan Kabupaten Bangkianang sera ibu kota Pekanbaru sehingga masyarakat menjadi masyarakat majemuk.
- c) Faktor Peraturan Nagari yang Belum Optimal , Peraturan nagari nomor 1 tahun 2007 tentang Kenagarian Rumbio dalam peraturan ini belum adanya aturan yang jelas tentang tata kehidupan bermasyarakat dan belum mengatur secara rinci mengenai sanksinya, peraturan nagari tersebut hanya mengatur secara umum mengenai hal-hal apa yang dilarang dalam rimba seperti yang termuat dalam peraturan Nagari Nomor 1 Tahun

³⁴ Ibid.hlm.69

2007 tentang *Rimba Larangan Adat* pasal 2 ayat 2 (berbunyi) “ yang pada kawasan rimba larangan tersebut dilarang melakukan penebangan kayu, dan kegiatan lain yang dapat merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung dalamnya serta kegiatan yang dapat merubah fungsi larangan tersebut”

belum jelasnya beberapa aturan sanksi yang termuat dan bersifat umum dalam peraturan nagari tersebut serta kurangnya sosialisasi terhadap peraturan nagari kepada masyarakat nagari yang majemuk menyebabkan penegakan hukum berdasarkan peraturan nagari tersebut belum optimal.

2. Sanksi sosial

Adapun bentuk sanksi sosial yang diterapkan oleh nagari limo koto terhadap pelaku pencurian kayu hutan larangan adat yaitu

- 1) Membuat jalan
- 2) Membersihkan musolah atau masjid
- 3) Membuat pengumuman larangan mengambil kayu hutan
- 4) Mengajak masyarakat tidak mengambil kayu hutan
- 5) Membuat parit

B. Kedudukan Hukum Pidana Adat dan kendala dalam Penegakan Hukum dan Praktiknya Di Nagari Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya

Perkara tindak pidana adat yang ditangani oleh pengadilan ternyata belum cukup karena masyarakat adat masih menghendaki pelakunya harus pulak “memulihkan keseimbangan“

yang terganggu dalam pelanggaran adat. Hukum pidana adat dengan hukum pidana barat tidak bisa disamakan dalam kondisi riil masyarakat Indonesia berlakunya hukum pidana nasional harus memperhatikan pulak hukum pidana adat seperti:

- 1) Delik adat terhadap perbuatan dan norma-norma kebiasaan
- 2) Delik adat terhadap mengganggu keamanan dan ketertiban

Masyarakat Limo Koto dizaman dulu berlakunya *undang si jalo ghampek* dan *undang nan duo puluah* dan tata cara pelaksanaan sanksi pidana mengenai ancaman menurut Taufik Abdullah bahwa tidak adanya kepastian hukum adat itulah terletak kekuatannya, maksudnya adalah jika dulu sewaktu zaman Snouck Hurgronje hukum adat ini jadi dikodifikasi maka adat akan hilang suatu saat nanti, hukum adat tidak akan sanggup menahan perubahan yang akan datang.³⁵ hukum adat Limo Koto. Redaksional pasal-pasal KUHP ancaman hukuman nya pidana penjara, Berlainan dengan hukum adat yang mana *Undang Si Jalo Ghapek Dan Undang Nan Duo Puluoh* ancaman hukuman nya tidak tertulis tetapi oleh ahli adat tradisional ialah mengutamakan hukuman pendidikan moral yang tidak mengenal hukuman pidana penjara, namun ancaman hukuman moral pidana adat dirasakan lebih berat dari pada penjara misalnya orang lebih suka masuk penjara dari pada menanggung malu karena dihukum ”*dibuang sepanjang adat*” yang berarti dikucilkan dari

³⁵ Suardi mahyuddin, Op.Cit, hlm. 241

masyarakat adat, tahapan dalam musyawarah atau mufakat untuk menyelesaikan perkara di Nagari Limo Koto.

- a) Penyelesaian Oleh Keluarga “Saranting” Adapun preoses penyelesaian seperti ini hanya dilakukan dalam keluarga besar saja yang dihadiri oleh niniok mamak pelaku kedua belah pihak
- b) Penyelesaian Oleh Sesuku “Sedahan” Proses ini dilakun apabila tidak adanya menemui titik kata kesepakatan terhadap proses penyelesaian dalam keluarga artinya diselesaikan oleh parahniniok mamak dalam satu suku dan jugak dihadiri oleh datuok pemimpin suku yang bertindak sebagai hakim atau yang ditinggikan seranting
- c) Penyelesaian Oleh Kerapatan Adat Nagari Dalam penyelesaian ini perkara biasanya yang diselesaikan berkaitan dengan soko dan pisoko, dalam hal penyelesaian nya dengan cara balik kepada asal mula agama dan adat “ adat bersandikan syara’, syara’ bersandikan kitabullah”. Dalam penyelesaian melalui KAN tadi diselesaikan bukan suku sendiri maka KAN akan menyelesaikan dengan membentuk sbuah badan peradilan. Ada beberapa pasal dalam KUHP dan undang-undang nan sedelapan memiliki kesamaan yaitu;
 - 1) “*Tikam- Bunuh*” (pasal 1)=“pembunuhan” kualifikasi (pasal 338) KUHPidana
 - 2) “*Upas Racun*” (pasal 2)=“pembunuhan berencana” kualifikasi (pasal 340) KUHPidana

- 3) “*Samun-Sakar*”(pasal 3) = “pembunuhan berencana” kualifikasi (pasal 340) KUHPidana
- 4) “*Siar - Bakar*” (pasal 4) = “kebakaran” kualifikasi (pasal 187) KUHPidana
- 5) “*Maling-Curi*” (pasal 5) = “pencurian” kualifikasi (pasal 362) KUHPidana
- 6) “*Rebut-Rampas*” (pasal 6) = “perampokan” kualifikasi (pasal 365) KUHPidana
- 7) “*Salah – Sumbang*” (pasal 8) = “penghinaan” kualifikasi (pasal 310) KUHPidana

Hukum pidana adat Limo Koto diatas menjadi *terra incognita* atau hukum pidana tidak dikenal dalam hukum pidana nasional,jika tidak digali, Hukum pidana adat yang tumbuh dan berkembang di provinsi Sumatra tengah merupakan penjelmaan dari jiwa dan nilai-nilai bagi masyarakat adat limo koto. Visi masyarakat Limo Koto untuk mencapai masyarakat adil dan makmur mustahil tercapai tanpa adanya norma dan hukum yang mengaturnya. Hukum pidana adat Limo Koto dalam *Undang Nan Sedalapan, Undang Si Jalo Ghapek* dan *Undang Nan Duo Belas* dan *Undang* yang lainnya ialah seluruh penghulu untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan anak keponakan serta seluruh anggota masyarakat dengan menegakan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa. Hal ini dapat diterapkan untuk menentukan kesalahan yang Dilakukan seorang di sidang peradilan pembentukan hukum pidana adat membutuhkan kebulatan lembaga

kerapatan adat nagari kampar (LKANK) agar supaya aturan adat dibuat berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat Adat Limo Koto.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksistensi pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian kayu hutan larangan adat adalah sanksi sosial dan denda adat yang mana hukuman sosial berupa membuat parit, membuat pengumuman larangan, megajak masyarakat serta memberitaukan kepada masyarakat adat dilarang mengambil kayu hutan nagari, dan diringi dengan pidana denda adat berupa sejumlah uang atau barang sesuai dengan dominal yang telah dijatuhkan kepada pelaku, yang mana diperuntukan untuk masyarakat setempat sebagai hukuman dan mengembalikan keseimbangan ditegah-tengah masyarakat. Namun pada saat ini di Rimba larangan masih bayak terdapatnya kayu di curi oleh masyarakat hal disebabkan kurangnya optimal pengawasan hutan di Kenagarian Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mulai mudarnya sanksi adat atau hukuman adat itu sendiri di Keagarian Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya antara lain disebabkan oleh penegakan hukum, masyarakat dan peraturan nagari yang belum mengatur secara rinci mengenai aturan dan snksi terhadap pelaku pencurian kayu tersebut, ada faktor yang mempengaruhi berkurangnya penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kayu yaitu faktor

masyarakat majemuk di Kenagarian Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya karena karakteristik masyarakat yang seperti itu menyebabkan segala pelanggaran yang ada ditengah-tengah masyarakat dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak melaporkan kepada pemuka masyarakat atau kerapatan adat nagari melalui mekanisme adat Kenagarian Limo Koto. Kedudukan pidana adat dalam penegakan hukum sama halnya dengan hukum pidana nasional karena terdapat beberapa pasal yang ada didalam KUHP diatur juga dalam hukum adat Limo Koto yang dinamakan *Si-Jalo Ghape* (diusut,periksa, diproses), *Undang Nan Sedelapan* (kejahatan) dan *Undang Nan Dua Belas* (pembuktian dan ciri kesalahan), seperti didalam KUHP tindak kejahatan terdapat dalam pasal 362 tentang pencurian di *Undang Nan Sadelapan* itu di dalam pasal 5 dengan perbuatan “maling-curi”. Setiap keputusan adat hasil peradilan adat yang diputuskan oleh kerapatan adat nagari yang mengadili seluruh perkara mengenai seluruh pelanggaran yang terdapat dalam *Undang Nan Sedelapan* memiliki kekuatan hukum tersendiri dan mengikuti pihak-pihak yang berpekar yang dapat mengesampingkan hukum nasional karena diputus oleh lembaga yang sah termasuk di Nagari Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya.

B. Saran

Eksistensi pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian kayu hutan larangan adat adalah sanksi sosial dan denda adat yang mana hukuman sosial berupa membuat parit, membuat

pengumuman larangan, megajak masyarakat serta memberitaukan kepada masyarakat adat dilarang mengambil kayu hutan nagari, dan diiringi dengan pidana denda adat berupa sejumlah uang atau barang sesuai dengan dominal telah dijatuhkan kepada pelaku sebagai hukuman dan mengembalikan keseimbangan ditegah-tengah masyarakat. Namun pada saat ini di Rimba larangan masih banyak terdapatnya kayu dicuri oleh masyarakat hal disebabkan kurangnya optimal pengawasan hutan di Kenagarian Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mulai mudarnya sanksi adat atau hukuman adat itu sendiri di Keagarian Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya antara lain disebabkan oleh penegakan hukum, masyarakat dan peraturan nagari yang belum mengatur secara rinci mengenai aturan dan sanksi terhadap pelaku pencurian kayu tersebut, ada faktor yang mempengaruhi berkurangnya penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian kayu yaitu faktor masyarakat majemuk di Kenagarian Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya karena karakteristik masyarakat yang seperti itu menyebabkan segala pelanggaran yang ada ditengah-tengah masyarakat dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak melaporkan kepada pemuka masyarakat atau kerapatan adat nagari melalui mekanisme adat Kenagarian Limo Koto Dan Kedudukan pidana adat dalam penegakan hukum sama halnya dengan hukum pidana nasional karena terdapat

beberapa pasal yang ada didalam KUHP diatur jugak dalam hukum adat Limo Koto yang dinamakan *Si-Jalo Ghape* (diusut,periksa, diproses), *Undang Nan Sedelapan* (kejahatan) dan *Undang Nan Dua Belas* (pembuktian dan ciri kesalahan), seperti didalam KUHP tindak kejahatan terdapat dalam pasal 362 tentang pencurian di *Undang Nan Sadelapan* itu di dalam pasal 5 dengan perbuatan “maling-curi”. Setiap keputusan adat hasil peradilan adat yang diputuskan oleh kerapatan adat nagari yang mengadili seluruh perkara mengenai seluruh pelanggaran yang terdapat dalam *Undang Nan Sedelapan* memiliki kekuatan hukum tersendiri dan mengikuti pihak-pihak yang berpekara yang dapat mengkesampingkan hukum nasional karena diputus oleh lembaga yang sah termasuk di Nagari Limo Koto Kecamatan Rumbio Jaya. Dan kepada Raja atau datuok yang ditinggikan seranting diangkat / dinobatkan untuk sebagai pucuk pemerintah (eksekutif) dan datuok berlima dari Limo Koto dalam pemerintahan nagari beserta perangkatnya, para penghulum suku sebagai pemangku legislative (perumusan hukum) dan niniok mamak sebagai yudikatifnya. Agar bersama-sama membentuk sebuah peraturan nagari yang mengatur tentang penegakan hukum adat dan susunan tata cara penyelesaian tindak pidana beserta sanksi serta bekerja sama dengan pemerintahan Negara Indonesia (polisi, perintah kehutan, lingkungan dan lain-lain). Dan rangka mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian kayu agar melakukan

sosialisasi mengenai “*adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah*” secara massif ke institusi pendidikan ataupun masyarakat pada umumnya agar menjauhi perbuatan yang dilarang oleh adat dan agama, mengadakan kajian-kajian agama dan mengadakan kajian mengenai adat serta mengembangkan budaya-budaya adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Suriayam Mustari Pide, 2014, *Huku Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Preadia Grup, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baksi, Bandung.
- Ali Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2018, *Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralime Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hayatul Ismi, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Ur Press, Pekanbaru
- Lsm Nakhoda, 2007, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Dinas Perhubungan Pariwisata Kabupaten Kampar
- Ulfia Hasana, 2012, *Buku Ajar Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan

Universitas Riau,
Pekanbaru
Erdianto Effendi, 2011, Hukum
Pidana Indonesia, PT.
Rafika Aditama, Bandung.
Rato Domunikus, 2011 Hukum Adat
(Suatu Pengantar Singkat
Memahami Hukum Adat
Diindonesia), Laks Bang
Pressindo, Yogyakarta.

B. Jurnal / Kamus / Makala

J. Crim. L., 2004 , “ eligibility right
liberty discriminatio”, vathek
publishing, chapter LXVIII,
Series 6 , winter, hlm, 473-
475. Diakses melalui www.fh.
Ur.ac,id diterjemakan dengan
google tanggal 19 september
2019.
Nail duxbur, 2017, “costum as law
in english law”, cambride of
law, chapter LXXVI, series 2
summer, 337-359. Diakses
melalui www.fh. Ur.ac,id
diterjemakan dengan google
tanggal 17 september 2019.
Erdianto effendi, 2011”, pengajuan
perundang-undangan hukum
pidan mahkama konstitusi
dalam kaitan dengan
perlindungan hak asasi
manusia”, artikel pada jurnal
konstitusi, BKK fakulta
hukum universitas riau
kerjasama dengan mahkamah
konstitusi, Vol IV , No 1 Juni
Steven Winduo,2018 , Customary
Law is A Living Law, diakses
melalui, www. ichcap.org,
pada tanggal 09 Januari 2019,
Mathias Reimann, 1989, The
Historical School Against

Codification: Savigny, Carter,
and the Defeat of the New
York Civil Code, American
Journal of Comparative Law,
Vol. 37,
Makalah disajikan dalam Seminar
Nasional, 7 Nopember 2017
*Eksistensi Hukum Adat
Sebagai Sarana Penyelesaia
Sangketa Dalam Masyarakat
Indonesia*”, Fakultas Hukum
Universitas Riau.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1967 Tentang ketentuan pokok
kehutanan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 8.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Agraria,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor
108.
Undang-Undang Adat Kenegarian
Rumbio Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Rimbah Laranagan
Adat.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekusaan
Kehakiman Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 137, tambahan
lembaran negara republik
indonesia nomor 5076